

PENERAPAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOYOLALI

Noviyati Rahmasari¹⁾, Alean Kistiani Hegy Suryana²⁾, Nur Asih Triatmaja³⁾

¹⁾ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Boyolali

²⁾ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Boyolali

³⁾ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Boyolali

E-mail: noviyati018@gmail.com ¹⁾, alean.kistiani@gmail.com ²⁾, Nurasihtriatmaja@gmail.com ³⁾

ABSTRAK

Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah dan menyajikan data yang akurat dalam mengukur kinerja pemerintah. Dalam akuntansi berbasis akrual dapat menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan dananya; lebih memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya; serta lebih riil menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya. Selain itu, dapat lebih memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya; dan berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan penyajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang di olah bersumber dari laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2022 hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 sudah sesuai pada BAKESBANGPOL Kabupaten Boyoali dan dilaksanakan mulai Tahun 2015, hanya terdapat 5 komponen seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Bakesbangpol tidak membuat laporan arus kas tetapi membuat buku kas umum, untuk arus kas OPD itu tentu nol. Dan tidak membuat laporan perubahan saldo anggaran lebih, karena ketika ada saldo itu diserahkan ke Pemerintah Kota, selaku Pemerintah yang memiliki kewenangan atas saldo tersebut. Sehingga, yang membuat laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih itu Pemerintah Kota/Kabupaten. Laporan keuangan yang digunakan. Laporan keuangan digunakan untuk mengukur capaian kinerja, bahan evaluasi dan pengambilan keputusan suatu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam hal ini pada BAKESBANGPOL. Adanya beberapa kendala penyajian seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang belum sepenuhnya menguasai dalam bidangnya dan kurangnya sosialisasi mengenai hal tersebut serta terdapat 3 faktor yang berpengaruh dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, PP Nomor 71 Tahun 2010

ABSTRACT

The implementation of PP No. 71 of 2010 is intended to improve the quality of government financial statement presentation and present accurate data in measuring government performance. In accrual-

based accounting can show how the government finances activities and meets its funding needs; better enable users of the report to evaluate the government's current ability to finance activities and meet its obligations; and more real shows the financial position of the government and changes in its financial position. In addition, it can provide more opportunities for the government to demonstrate the success of the management of the resources it manages; and useful for evaluating government performance in terms of efficiency and effectiveness of resource use. The purpose of this research is to find out the implementation of the presentation of financial reports based on Government Regulation Number 71 of 2010. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. Data obtained through observation, interviews and documentation. The processed data comes from the financial reports of the Boyolali Regency National Unity and Political Unity Agency (BAKESBANGPOL) for 2021-2022. The results of this study show that the implementation of PP No. 71 of 2010 is in accordance with BAKESBANGPOL Boyoali Regency and implemented starting in 2015, there are only 5 components such as Budget Realization Reports, Operational Reports, Changes in Equity Reports, Balance Sheets and Notes to Financial Statements. Bakesbangpol does not make a cash flow report but makes a general cash book, for OPD cash flow, of course, zero. And don't make a report on changes to the balance of the budget excess, because when there is a balance it is submitted to the City Government, as the Government which has authority over the balance. Thus, it is the City/Regency Government that makes the cash flow reports and reports on changes in the balance of the excess budget. Financial reports used. Financial reports are used to measure performance achievements, evaluation materials and decision making of a Regional Government Organization (OPD) in this case at BAKESBANGPOL. There are several presentation obstacles such as the lack of human resources (HR) who have not fully mastered their field and the lack of socialization regarding this matter and there are 3 factors that influence the implementation of PP No. 71 of 2010.

Keywords: *Financial Statements, PP Number 71 of 2010*

1. Pendahuluan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretris Daerah. Dan juga sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang memiliki kewajiban untuk melakukan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS) dan terdapat 5 komponen laporan keuangan didalamnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat 7 (tujuh) komponen laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tetapi, terdapat 2 komponen laporan keuangan yang dikecualikan yaitu Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, karena laporan tersebut hanya disajikan oleh bendahara umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum negara/daerah. Jadi, untuk OPD hanya menyajikan 5 (lima) komponen laporan keuangan. penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 membawa perubahan terhadap pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan, selain itu juga digunakan sebagai aturan yang menjadi acuan pemerintahan dalam membuat laporan keuangan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal. Penerapan wajib dilaksanakan baik untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memiliki 3 faktor yang sangat berpengaruh terhadap penerapannya faktor pertama adalah Sumber Daya Manusia (SDM) seperti tingkat pendidikan staf, jika staf/pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka semakin tinggi juga ilmu atau pengetahuan yang dimiliki. Pelatihan, semakin banyak sumber daya manusia mengikuti pelatihan juga akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas, dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali masih kurang pelatihan ataupun sosialisasi

mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terhadap penyajian laporan keuangan. Latar belakang pendidikan pimpinan merupakan salah satu tolak ukur seseorang dapat dikatakan profesional atau tidak, latar belakang pendidikan yang tinggi diharapkan memiliki kualitas tingkat profesionalitas dalam pekerjaan.

Faktor yang kedua yaitu dari organisasional seperti kualitas teknologi dan informasi mencakup dukungan teknis dan pemeliharaan agar dapat berjalan dengan baik, dimana berpengaruh dalam perlindungan data dan beban kerja BAKESBANGPOL dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan menggunakan sistem yang disebut *Financial Management Information System (FMIS)* untuk mengefisiensi waktu, mengurangi beban kerja dan meminimalkan kesalahan yang akan terjadi . Dan dukungan konsultan berupa masukan atau saran yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Faktor ketiga adalah fungsional seperti pengalaman satuan kerja dibidang tersebut karena pada dasarnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali terdapat pegawai yang berpengalaman kerja tetapi, tidak sesuai bidangnya . Dan ukuran satuan kerja menunjukkan jumlah pegawai yang mana dalam BAKESBANGPOL memiliki jumlah pegawai yang sangat terbatas dan bisa dikatakan kurang, karena idealnya sekitar 35.

Komponen laporan keuangan yang disajikan oleh BAKESBANGPOL hanya ada 5 seperti Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Bakesbangpol merupakan salah satu OPD yang tidak membuat laporan arus kas tetapi membuat buku kas umum, untuk arus kas OPD itu tentu nol. Dan tidak membuat laporan perubahan saldo anggaran lebih, karena ketika ada saldo itu diserahkan ke Pemerintah Kota, selaku Pemerintah yang memiliki kewenangan atas saldo tersebut. Jadi, yang membuat laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih itu Pemerintah Kota/Kabupaten.

Dari latar belakang tersebut maka, penulis ingin mengetahui implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada BAKESBANGPOL Kabupaten Boyolali. Manfaat dari penelitian ini adalah menjadi tambahan ilmu bagi penulis, memberikan informasi kepada instansi terkait dan menambah relasi.

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Teori Legitimasi

Teori Legitimasi yaitu teori yang mengungkapkan bagaimana suatu organisasi berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi sudah sesuai dengan harapan masyarakat dimana organisasi tersebut beroperasi. Organisasi berusaha untuk memastikan aktivitas yang dilakukan responsif terhadap nilai-nilai yang ada dalam organisasi. Legitimasi adalah hubungan antara seorang pemimpin dengan yang dipimpin (Indriani *et al*, 2019). Keterkaitan teori dengan penelitian ini yaitu sebagai bahan pertanggungjawaban dari bagian pengelolaan maupun penyajian laporan keuangan dan pengambilan keputusan dimana pemimpin yang berhak atas hal tersebut.

2.2 Basis Akuntansi Pemerintah

Menurut Sabloit dan Suryaningsi (2021) dasar pencatatan yang digunakan untuk menentukan waktu transaksi harus diakui disebut basis akuntansi. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan biasanya menggunakan 2 (dua) jenis basis yaitu dengan basis kas dan akrual.

a. Basis Kas (cash basis)

Teknik pencatatan transaksi yang dilakukan ketika penerimaan atau pengeluaran uang merupakan konsep penting dalam akuntansi yang disebut dengan basis kas. Kelebihan basis kas adalah dapat memperlihatkan sumber dana, alokasi, dan penggunaan sumber kas, mudah untuk dipahami, tidak memerlukan pengetahuan secara detail mengenai akuntansi. Tetapi, akuntansi dengan basis kas terbatas karena hanya berfokus pada arus kas dalam periode berjalan dan mengabaikan arus sumber daya lainnya (Hartati dkk,2020).

b. Basis Akrual (accrual basis)

Teknik pencatatan transaksi yang dilakukan ketika transaksi terjadi meskipun belum ada penerimaan atau pembayaran uang disebut dengan basis akrual. Untuk pengukuran aset,

kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa basis akrual merupakan transaksi yang diakui saat kas belum diterima ataupun dibayar (Hartati dkk, 2020). Hasil dari penerapan terhadap laporan keuangan tersebut dapat berguna memberi bagi pemangku kepentingan.

2.4 Penerapan SAP Berbasis Akrual

Acuan yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan yaitu PP. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaporkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan secara sistematis pada periode tertentu untuk bahan evaluasi. Hal ini bertujuan agar para *stakeholder* dapat menilai kinerja pada periode tertentu dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan.

Pemerintah Daerah harus melaksanakan penerapan sistem akuntansi pemerintahan pada pengelolaan maupun penyajian laporan keuangan dengan baik. Dengan diterapkannya SAP berbasis akrual dapat merubah penyajian laporan keuangan pemerintahan pusat maupun daerah menjadi lebih baik. Suatu entitas pemerintahan wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual, agar dapat menyajikan suatu informasi secara akuntanbel dan transparan dan diterapkan di seluruh pemerintahan yang ada di Indonseia (Jusmani dkk, 2020).

Menurut Desipradani dan Rusmawati (2017) terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pengimplementasian SAP yaitu:

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Tingkat pendidikan staf
 - b. Pelatihan
 - c. Latar belakang pendidikan seorang pemimpin
2. Faktor Organisasional
 - a. Kualitas teknologi dan informasi
 - b. Dukungan konsultan
3. Faktor Fungsional
 - a. Pengalaman satuan kerja dalam bidang tersebut
 - b. Ukuran satuan kerja

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Hartati dkk, 2020) variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah SAP. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatra Selatan pada Tahun Anggaran 2018 belum menerapkan karena pencatatan dan pembukuan laporan keuangan belum sesuai dan pencatatan transaksi dilakukan pada saat terjadinya kegiatan uang diterima atau uang dikeluarkan.

Penelitian yang dilakukan (Sabloit dan Suryaningi, 2021) variabel dalam penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Instansi. Bahwa hasil dari penelitian ini adalah penyajiannya telah sesuai dan dalam penyusunan laporan keuangannya menggunakan aplikasi SAIBA.

Penelitian yang dilakukan (Bendelina Sabloit & Suryaningi, 2021) Analisis Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Pengadilan Militer III-15 Kupang), variabel dalam penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Instansi. Bahwa hasil dari penelitian ini adalah penyajiannya telah sesuai dan dalam penyusunan laporan keuangannya menggunakan aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual).

Penelitian yang dilakukan oleh Jusmani *et al.*, 2022 dengan judul Analisis Penerapan SAP Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir metode yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan sejak Tahun 2019, jadi sudah sesuai.

Penelitian yang dilakukan oleh Manjana & Nasution, (2022) dengan judul Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Sesuai PP No. 71 Tahun 2010 pada Badan Pengelola

Kuangan Daerah Kota Pematangsintar. Metode yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai.

Penelitian yang dilakukan oleh Saragi *et al.*, (2021) dengan judul Analisis Penerapan SAP Berbasis Akrua (PP. 71/2010) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai.

3. Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali adalah OPD yang terletak di Jl. Merdeka Timur (Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali), Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Periode waktu penelitian adalah pada bulan April sampai dengan Mei 2023. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata yang disusun menjadi sebuah kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara atau dokumenter antara peneliti dengan informan (Desipradani dan Rusmawati, 2017).

Teknik pengumpulan data diantaranya yaitu:

1. Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dan mencatat kegiatan yang dilaksanakan oleh objek penelitian (Sabloit dan Suryaningsi, 2021). Sehingga penulis dapat mengetahui gambaran yang lebih nyata untuk melakukan penelitian terkait.
2. Data yang didapatkan dengan memberikan pertanyaan langsung (tanya jawab) oleh pewawancara kepada informan *Interview* yang digunakan adalah dengan metode *Structured Interview*. *Structured Interview* adalah wawancara dalam bentuk dimana seorang penanya telah menyiapkan berbagai pertanyaan yang secara mendetail dengan urutan yang sudah dibuat dan diproses, *interview* tersebut mengikuti urutan dan daftar pertanyaan yang telah dibuat secara ketat (Sabloit dan Suryaningsi, 2021). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten (BAKESBANGPOL) Boyolali untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan. Adapun pertanyaan yang diajukan sebagai berikut
 - 1) Apakah menurut bapak laporan keuangan penting bagi suatu instansi dan digunakan dalam pengambilan keputusan?
 - 2) Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada BAKESBANGPOL sudah sesuai dengan PP NO. 71 Tahun 2010 dan diterapkan sejak kapan?
 - 3) Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan apakah mengalami hambatan?
 - 4) Pada BAKESBANGPOL Kabupaten Boyolali laporan apa saja yang dibuat?
3. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang relevan berkaitan dengan masalah, meliputi data kualitatif yang terdiri dari dokumen pengelolaan keuangan. Teknik ini digunakan untuk meneliti dokumen-dokumen (Bendelina Sabloit & Suryaningsi, 2021). Gambar dan laporan keuangan yang disajikan oleh BAKESBANGPOL merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

1. Laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten boyolali

Laporan keuangan digunakan untuk menilai kondisi laporan keuangan entitas, membandingkan antar realisasi anggaran dan anggaran yang sudah ditetapkan oleh suatu entitas. laporan keuangan adalah laporan tentang transaksi keuangan secara terstruktur yang dilakukan entitas atau perusahaan. Arti lain laporan keuangan adalah proses pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian informasi yang memiliki manfaat sebagai bahan untuk mengambil keputusan serta menilai kinerja suatu pemerintahan (Saragi dkk, 2021).

Standar akuntansi merupakan dasar yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh BAKESBANGPOL Kabupaten Boyolali dianalisis dan dilihat kesesuaiannya dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Perda Kabupaten Boyolali telah berusaha untuk menyajikan Laporan Keuangan agar sesuai. Akun aset dan kewajiban yang timbul dalam pengungkapannya telah menggunakan basis akrual. Akun pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya menggunakan basis kas serta dalam pelaporan keuangan pada pemerintah daerah menggunakan basis akrual. BAKESBANGPOL Kabupaten Boyolali sudah menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Berdasarkan penjelasan dan teori yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, sejak tahun 2015 BAKESBANGPOL Kabupaten Boyolali juga telah memberikan lampiran pada perhitungan tahunan dan mengikuti standar akuntansi. Lampiran Laporan Keuangan (CaLK) BAKESBANGPOL Kabupaten Boyolali berisi laporan rinci tentang nilai properti sebagaimana disajikan dalam berbagai laporan keuangan yang ada dan sesuai dengan dasar yang berlaku untuk transaksi tersebut. Berikut laporan keuangan yang telah disajikan oleh BAKESBANGPOL Kabupaten Boyola



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 8-01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 SKPD : 8-01 0-00 0-00 01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 Unit Organisasi : 8-01 0-00 0-00 01 000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 Sub Unit Organisasi : 8-01 0-00 0-00 01 000 000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	BELANJA	6.537.458.000,00	6.156.431.404,00	94,17	4.441.332.513,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.315.608.000,00	5.908.658.204,00	94,06	4.441.332.513,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.516.420.000,00	2.249.555.754,00	89,32	1.715.555.917,00
5.1.02	Belanja Barang	1.150.188.000,00	1.044.274.250,00	90,79	450.035.115,00
5.1.05	Belanja Hibah	2.647.000.000,00	2.646.828.200,00	99,99	2.275.741.481,00
5.2	BELANJA MODAL	221.850.000,00	215.773.200,00	97,26	0,00
5.2.02	Belanja Perbaikan dan Mesin	201.850.000,00	197.463.700,00	97,83	0,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	16.309.500,00	81,55	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(6.537.458.000,00)	(6.156.431.404,00)	0	(4.441.332.513,00)
	SISA LEBIH/ KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKEMAAAN	(6.537.458.000,00)	(6.156.431.404,00)	0	(4.441.332.513,00)



BOYOLOALI, 15 Desember 2023
 BOYOLOALI, 15 Desember 2023
 NPS: 46600271990031002

Printed By SMDA NSI T. 2023

Gambar 4 1 Laporan Realisasi Anggaran

 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI LAPORAN OPERASIONAL Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021					
KODE	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN (%)	
	KEGIATAN OPERASIONAL				
	BEBAN				
09.01.00	Beban Pegawai	6.109.562.438,00	4.622.786.116,00	1.486.776.322,00	32,16
09.02.00	Beban Persewaan	2.243.363.454,00	1.746.605.109,00	496.758.345,00	28,44
09.03.00	Beban Jasa	430.975.458,00	193.316.525,00	237.658.933,00	122,94
09.04.00	Beban Pemeliharaan	481.237.519,00	177.128.390,00	304.109.129,00	171,69
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	104.975.473,00	63.150.500,00	41.824.973,00	66,23
09.08.00	Beban Hibah	71.223.000,00	13.036.000,00	58.187.000,00	446,78
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.646.828.200,00	2.275.741.481,00	371.086.719,00	16,31
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(6.109.562.438,00)	(4.622.786.116,00)	(1.486.776.322,00)	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
10.04.00	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	29.335.000,00	0,00	29.335.000,00	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(29.335.000,00)	0,00	(29.335.000,00)	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6.138.897.438,00)	(4.622.786.116,00)	(1.516.111.322,00)	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.138.897.438,00)	(4.622.786.116,00)	(1.516.111.322,00)	0



Printed By: SIMDA-NG | 7/1

Gambar 4 2 Laporan Operasional



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 Unit : 8-01.0-00.0-00.01.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 Sub Unit : 8-01.0-00.0-00.01.000.0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	1.589.064.692,00	1.703.739.124,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.138.897.438,00)	(4.622.786.116,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	1.686.309.000,00	66.779.171,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6.156.431.404,00	4.441.332.513,00
EKUITAS AKHIR	3.292.907.658,00	1.589.064.692,00

Boyolali, 31 Desember 2022
 KEPALA BADAN

 ARIF BUDI NUGANTO, SH, MM
 NIP. 196609271990031002



Gambar 4 3 Laporan Perubahan Ekuitas



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
NERACA
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Unit : 8-01.0-00.0-00.01.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sub Unit : 8-01.0-00.0-00.01.000.0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	855.400,00	3.326.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	855.400,00	3.326.000,00
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	1.339.105.262,00	1.252.434.762,00
Gedung dan Bangunan	3.433.454.200,00	1.775.905.200,00
Aset Tetap Lainnya	235.000,00	235.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.406.144.937,00)	(1.362.585.603,00)
JUMLAH ASET TETAP	3.366.649.525,00	1.665.989.359,00
ASET LAINNYA		
Aset Lain-lain	34.411.500,00	63.746.500,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(34.411.500,00)	(63.171.500,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	575.000,00
JUMLAH ASET	3.367.504.925,00	1.669.890.359,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	74.597.267,00	80.825.667,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	74.597.267,00	80.825.667,00
JUMLAH KEWAJIBAN	74.597.267,00	80.825.667,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	3.292.907.658,00	1.589.064.692,00
JUMLAH EKUITAS	3.292.907.658,00	1.589.064.692,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.367.504.925,00	1.669.890.359,00

MENGETAHUI
KEBANGPOL
BOYOLALI

BAKESBANGPOL

* **NIE BUDI NURANTO, S.H., MM.**
Pembina Tk. I
NIP. 19660927 199003 1 002

Gambar 4 4 Neraca

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memiliki 3 faktor yang sangat berpengaruh terhadap penerapannya yaitu:

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) seperti tingkat pendidikan staf, jika staf/pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka semakin tinggi juga ilmu atau pengetahuan yang dimiliki. Pelatihan, semakin banyak sumber daya manusia mengikuti pelatihan juga akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas, dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali masih kurang pelatihan ataupun sosialisasi mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terhadap penyajian laporan keuangan. Latar belakang pendidikan pimpinan merupakan salah satu tolak ukur seseorang dapat dikatakan profesional atau tidak, latar belakang pendidikan yang tinggi diharapkan memiliki kualitas tingkat profesionalitas dalam pekerjaan.
2. Faktor organisasional seperti kualitas teknologi dan informasi mencakup dukungan teknis dan pemeliharaan agar dapat berjalan dengan baik, dimana berpengaruh dalam perlindungan data dan beban kerja BAKESBANGPOL dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan menggunakan sistem yang disebut *Financial Management Information System*

(FMIS) untuk mengefisiensi waktu, mengurangi beban kerja dan meminimalkan kesalahan yang akan terjadi . Dan dukungan konsultan berupa masukan atau saran yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

3. Faktor fungsional seperti pengalaman satuan kerja dibidang tersebut karena pada dasarnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali terdapat pegawai yang berpengalaman kerja tetapi, tidak sesuai bidangnya . Dan ukuran satuan kerja menunjukkan jumlah pegawai yang mana dalam BAKESBANGPOL memiliki jumlah pegawai yang sangat terbatas dan bisa dikatakan kurang, karena idealnya sekitar 35.

2. Penerapan Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali

Dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat 7 komponen laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tetapi, terdapat 2 komponen laporan keuangan yang diceualikan yaitu Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, karena laporan tersebut hanya disajikan oleh bendahara umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum negara/daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali merupakan salah satu OPD Kabupaten Boyolali yang harus melaksanakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada pengelolaan maupun penyajian laporan keuangan dengan baik. Agar membawa perubahan yang baik pada laporan keuangan yang disajikan, maka perlu diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Terdapatnya kendala seperti kurangnya sosialisasi maupun bimbingan sehingga pada saat pengerjaan pembukuan hanya sedikit yang memiliki pemahaman dan sumber daya manusia yang kurang berkompeten terhadap pengelolaan keuangan dan penyajian keuangan laporan keuangan. Komponen laporan keuangan yang disajikan oleh BAKESBANGPOL hanya ada 5 seperti Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Bakesbangpol merupakan salah satu OPD yang tidak membuat laporan arus kas tetapi membuat buku kas umum, untuk arus kas OPD itu tentu nol. Dan tidak membuat laporan perubahan saldo anggaran lebih, karena ketika ada saldo itu diserahkan ke Pemerintah Kota, selaku Pemerintah yang memiliki kewenangan atas saldo tersebut. Jadi, yang membuat laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih itu Pemerintah Kota/Kabupaten.

Laporan Keuangan OPD disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Pemda Kabupaten Boyolali telah berusaha untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Pengungkapan untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan sudah menerapkan basis akrual, pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya menerapkan basis kas dan untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh BAKESBANGPOL Kabupaten Boyolali

sudah melaksanakan penerapan PP No. 71 Tahun 2010.

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan pembahasan pada penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan penyajian laporan keuangan pada BAKESBANGPOL Kabupaten Boyolali telah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dilaksanakan sejak Tahun 2015 dan dalam penyusunannya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), sekarang disebut dengan *Financial Management Information System* (FMIS) merupakan perkembangan dari SIMDA untuk memudahkan dalam memanajemen keuangan KESBANGPOL Bakesbangpol tidak membuat laporan arus kas tetapi membuat buku kas umum, untuk arus kas OPD itu tentu nol. Dan tidak membuat laporan perubahan saldo anggaran lebih, karena ketika ada saldo itu diserahkan ke Pemerintah Daerah, selaku Pemerintah yang memiliki kewenangan atas saldo tersebut. Sehingga, yang membuat laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih itu Pemerintah Daerah. Laporan keuangan digunakan untuk mengukur capaian kinerja, bahan evaluasi dan pengambilan keputusan pada BAKESBANGPOL. Terdapatnya kendala dalam penyajian laporan keuangan yang dipengaruhi oleh faktor SDM, faktor organisasional dan faktor fungsional.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil wawancara kurang komprehensif melibatkan pemangku kebijakan pengelolaan keuangan
2. Durasi laporan keuangan 2 (dua) Tahun (Tahun 2021 dan 2022) kurang representatif untuk diteliti secara deskriptif kualitatif.

5.3 Saran

1. Untuk BAKESBANGPOL Kabupaten Boyolali
Perlu diadakannya bimbingan, pelatihan ataupun sosialisasi, berpartisipasi dengan satuan kerja yang di ampu, meningkatkan kemampuan yang sesuai dalam bidangnya dan meningkatkan kemampuan manajemen dalam tata kelola keuangan.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang sejenis dengan lebih mengarahkan pada penelitian kuantitatif dan data yang digunakan minimal 5 Tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Catatan atas Laporan Keuangan BAKESBANGPOL
- [2] Desipradani, G. & Rusmawati, Z. 2017. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Di Pemkot Surabaya*. Dalam Majalah. Vol. XXII No. 2. Surabaya.
- [3] Hartati, S., Hendri, E., & Lilianti, E. 2020. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatra Selatan*. Dalam Jurnal Mediasi. Vol. 2 No. 2. Palembang.
- [4] Jusmani., Hendri, E., & Kurniawan, T. B. 2022. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemeritahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir*. Dalam Jurnal Media Akuntansi. Vol. 4 No. 2. Palembang.
- [5] Laporan Operasional BAKESBANGPOL
- [6] Laporan Perubahan Ekuitas BAKESBANGPOL
- [7] Laporan Realisasi Anggaran BAKESBANGPOL
- [8] Neraca BAKESBANGPOL
- [9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- [10] Sabloit, D. B. & Suryaningsti. 2021. *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual*

- berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Pengadilan Militer III-15 Kupang). Dalam Jurnal Akuntansi (JA). Vol. 8 No. 3. Kupang.*
- [11] Saragi, R. U., Sriwiyanti, E., & Tarigan, V. 2021. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PP. 71/2010) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun*. Jurnal Ilmiah AccUsi.
- [12] *berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Pengadilan Militer III-15 Kupang). Dalam Jurnal Akuntansi (JA). Vol. 8 No. 3. Kupang.*
- [13] Saragi, R. U., Sriwiyanti, E., & Tarigan, V. 2021. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PP. 71/2010) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun*. Jurnal Ilmiah